

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguasa bisa sediakan bermacam alat serta infrastruktur ekonomi serta sosial yang ditunjukkan buat keselamatan orang dengan fiskal pendapatan yang berawal dari fiskal. Pangkal pendapatan yang dipakai buat membantu pengeluaran teratur serta membantu pembangunan berawal dari fiskal yang bermanfaat untuk kebutuhan bersama dengan tujuan menghasilkan kehidupan warga yang aman. Penguasa penuh keinginan anggaran dengan memercayakan 2 pangkal utama, yaitu sumber anggaran luar negara serta pangkal anggaran dalam negara. Pangkal anggaran luar negara misalnya pinjaman luar negara dan sumbangan, sebaliknya pangkal dana dalam negara misalnya pemasaran migas serta non migas dan fiskal.

Sektor pendapatan APBN didapat dari pendapatan dari zona fiskal, bagaikan suatu kebijaksanaan yang lebih memandang ke dalam inward looking policy, pendapatan dari zona pajak diharapkan mampu mengurangi pinjaman luar negara dan sanggup membangun perekonomian Indonesia terus menjadi pulih dengan infrastruktur yang didapat dari peruntukan pendapatan fiskal. Pendapatan fiskal ini selaras dengan tujuan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Fiskal berlaku seperti daulat fiskal yang berkompeten di negara ini, ialah menghimpun pendapatan negeri dari zona fiskal untuk mendukung independensi pembiayaan APBN, dari tahun ketahun tingkatan pendapatan fiskal lalu bertambah. Seluruh itu tidak terbebas dari kedudukan penguasa serta harus fiskal. Pengecekan fiskal yang diserahkan serta disiplin harus fiskal bisa pengaruhi kenaikan pendapatan fiskal. Pengecekan fiskal ialah salah satu konkretisasi dari aparatur fiskal bagaikan aku warga disamping bagaikan aku negeri untuk tingkatan pendapatan fiskal, pengecekan fiskal yang dicoba pada harus fiskal ialah salah satu usaha dalam tingkatan disiplin harus fiskal.

Kenaikan mutu serta jumlah pengecekan harus fiskal diharapkan bisa memunculkan ketaatan pada harus fiskal bagaikan klien alhasil tingkatkan disiplin dalam aspek perpajakan. Terus menjadi melonjaknya disiplin dalam aspek perpajakan diharapkan bisa pula tingkatkan pendapatan fiskal. Sebab pendapatan fiskal ialah pangkal penting APBN terbanyak yang diperoleh spesialnya berasal dari Fiskal Pemasukan Tubuh.

Dalam bagan tingkatkan pembangunan nasional supaya bisa lalu bertumbuh hingga diperlukan terdapatnya pendapatan fiskal. Buat menciptakan self assessment system dituntut disiplin harus fiskal itu sendiri, tetapi dalam faktanya belum seluruh kemampuan fiskal yang terdapat bisa digali, karena sedang banyak harus fiskal yang belum mempunyai pemahaman hendak alangkah berartinya pelampiasan peranan perpajakan bagus untuk negeri ataupun untuk mereka sendiri bagaikan masyarakat negeri yang bagus. Usaha supaya sasaran fiskal bisa berhasil amat berhubungan dengan kewajiban penguasa spesialnya Direktorat Jenderal Fiskal dalam melaksanakan pembinaan pada harus fiskal, dengan tingkatkan jasa serta melaksanakan pengawasan buat tingkatkan disiplin harus fiskal. Aktivitas pengawasan ini dilaksanakan lewat pengawasan administratif, aplikasi ganjaran, penagihan, serta investigasi fiskal. Wujud pengawasan yang dicoba Direktorat Jenderal Fiskal ini didasarkan pada Artikel 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Pergantian Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai Determinasi Biasa serta Aturan Metode Perpajakan (Undang-Undang Kudeta) yang melaporkan Direktorat Jenderal Fiskal dalam bagan pengawasan berhak melaksanakan pengecekan buat mencoba disiplin pelampiasan peranan perpajakan serta tujuan lain buat melakukan determinasi peraturan perundangjakaan yang legal. Target yang dituju dalam aktivitas pengecekan ini ialah anjuran pengawas kepada pemahaman harus fiskal dalam penuhi kewajibannya.

Partisipasi pendapatan fiskal kepada pendapatan negeri diharapkan terus menjadi bertambah disetiap tahunnya, terutamadi Kota Padang partisipasi Fiskal Wilayah menggapai pada umumnya 66, 53% buat itu butuh didorong pendapatan fiskal yang lebih besar, tidak takhluk berartinya merupakan tingkatan disiplin harus fiskal dalam melunasi pajaknya dengan betul, alhasil bisa tingkatan pendapatan dari zona pajak.

Melihat pentingnya pemeriksaan pajak dalam pencapaian target dari penerimaan pajak, maka saya tertarik membahas mengenai **“PROSES PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan pajak di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang ?
2. Bagaimana upaya pencapaian target penerimaan pajak di Badan Pendapatan
3. Daerah (BAPENDA) Kota Padang ?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan pajak di badan pendapatan daerah kota padang
2. Untuk mengetahui upaya pencapaian target penerimaan pajak di badan pendapatan kota padang

1.4 Manfaat Magang

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan menerapkan ilmu yang di peroleh di perkuliahan

2. Menambah pengalaman penulis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja
3. Untuk aktifitas pemeriksaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengakulasi serta menekuni bermacam materi pustaka yang melingkupi novel bacaan serta materi-materi kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang lagi diulas oleh pengarang.



1.5.2 Studi Lapangan

1. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang bersangkutan

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang di bahas

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan informasi magang ini dipecah atas 5 ayat yang mana di tiap ayat terdiri dari sub-sub yang jadi satu kesatuan kerangka karangan uraian permasalahan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, dan proses pemeriksaan pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
: Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

BAB IV PEMBAHASAN : Bab ini lebih lanjut menjelaskan tentang “Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”.

BAB V PENUTUP: Membahas tentang kesimpulan dan saran